

MENINJAU GERAKAN MODERASI BERAGAMA PADA ORGANISASI SIPIL: Strategi Organisasi Kemahasiswaan di Kota Semarang

Khasiatun Amaliyah

khasiatunamaliyah12@gmail.com

Pesantren Riset Al-Muhtada, Semarang

Andhika Putri Maulani

andhikaputrimaulani@gmail.com

Pesantren Riset Al-Muhtada, Semarang

Ismi Zakiyah

ismizakiyah2@gmail.com

Pesantren Riset Al-Muhtada, Semarang

Naylatus Zahro

nailaaazzahra018@gmail.com

Pesantren Riset Al-Muhtada, Semarang

Abstract

One of the strategic agents of religious moderation is university student organisations. This research discusses student organisations interfaith in Semarang City. The approach used here is the functional structural theory by Talcott Parson regarding civil organisations as a social system in society. Through this approach, researchers aim to examine the role of student organisations in Semarang in implementing the values of religious moderation. This research shows that student organisations in Semarang reflect a diverse vision of religious moderation. From the study of six organisations including PMII, HMI, KAMMI, GMNI, IMM, and PMKRI, researchers formulate models of religious moderation



movement in these student organisations, namely, (1) Through the student interfaith discussion forum which emphasises the provision of facilities and forums given to students in implementing the values of religious moderation; (2) Through the public interfaith forum reaches out the general public through various activities that integrated the value of religious moderation and social movements; (3) Through the Orientation of Organisational Movement, the role and function of the organisation, both through works program, vision and mission with concerns towards implementing and practising religious moderation. This research is qualitative and uses the descriptive-analytical method. The data of the research are presented in descriptive form.

Keyword: Religious Moderation, Student organizations, Semarang City, Interfaith Movement.

Abstrak

Salah satu agen strategis moderasi beragama adalah organisasi kemahasiswaan. Penelitian ini membahas organisasi kemahasiswaan lintas agama di Kota Semarang. Pendekatan yang digunakan adalah teori struktural fungsional yang dikembangkan oleh Talcott Parson tentang organisasi masyarakat sebagai suatu sistem sosial dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, peneliti hendak menelaah peran organisasi kemahasiswaan di Semarang dalam mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama. Penelitian ini menunjukkan bahwa organisasi-organisasi kemahasiswaan di Kota Semarang memiliki visi yang beragam tentang moderasi beragama. Dari telaah pada 6 organisasi yang meliputi PMII, HMI, KAMMI, GMNI, IMM, dan PMKRI, penulis merumuskan model-model gerakan moderasi beragama pada organisasi kemahasiswaan tersebut, di antaranya, (1) Melalui forum diskusi lintas agama (Linag) Mahasiswa yang menekankan pada penyediaan sarana maupun forum yang diberikan kepada mahasiswa dalam mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama; (2) Melalui forum kegiatan lintas agama (Linag) Umum yang menjangkau masyarakat umum lewat berbagai kegiatan yang mengintegrasikan nilai moderasi beragama dan gerakan sosial; (3) Melalui Arah Gerak Organisasi, yakni melalui peran serta fungsi organisasi, baik melalui program-program kerja, visi dan misi dengan konsen yang berorientasi pada mengimplementasikan maupun pengamalan moderasi beragama. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif-analitis. Data-data penelitian yang diperoleh disajikan dalam bentuk deskriptif.

Kata kunci: Moderasi beragama; Organisasi kemahasiswaan; Kota Semarang; Gerakan lintas agama.

I. PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dari keberadaan organisasi kemahasiswaan lintas agama di Kota Semarang dalam moderasi beragama. Organisasi kemahasiswaan lintas agama di kota Semarang ini meliputi PMII, HMI, KAMMI, GMNI, IMM, dan PMKRI. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengembangan model moderasi beragama di kalangan organisasi kemahasiswaan lintas agama di kota Semarang. Sebagai suatu bangsa yang beragam dan majemuk ditinjau dari ras, suku, bahasa, etnis, kebudayaan, dan agama. Indonesia memiliki dua kondisi yaitu peluang dan kesempatan. Munculnya konflik dan integrasi menjadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Konflik muncul sebagai akibat dari adanya berbagai perbedaan yang ada, namun dari perbedaan tersebut juga bisa menjadi bentuk dari pengintegrasian suatu bangsa. Inilah yang nanti disebut sebagai keragaman yang mengintegrasikan. Melihat hal itu, maka perlu adanya suatu keseimbangan antara potensi yang dimiliki sebagai suatu bangsa majemuk dengan melihat kemungkinan munculnya konflik dan disintegrasi akibat adanya kemajemukan tersebut. Hal lain yang dipandang cukup krusial berkaitan dengan Indonesia sebagai bangsa yang majemuk adalah soal agama. Mayoritas masyarakat Indonesia adalah penganut agama Islam dengan jumlah sekitar 17.245.375 jiwa. Disusul dengan agama Kristen sekitar 1.467.043 jiwa. Hindu dan Budha sekitar 764.700 jiwa. Katolik sekitar 764.420 jiwa. Konghucu 7.191 jiwa, dan terakhir dari penganut kepercayaan lain ada 11.737 jiwa (Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022).

Keanekaragaman yang ada harus juga diseimbangkan dengan perilaku toleransi dan tanggung jawab secara sosial di dalam beragama. Artinya, mengetahui dan memahami bahwa adanya perbedaan-perbedaan seperti yang disebutkan adalah perkara maupun hal yang wajar, namun tetap harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab di sini diartikan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keyakinan dan agama yang dianutnya dengan tidak bersikap fanatik dan atau intoleran terhadap keberadaan agama lainnya yang pada akhirnya dapat memicu terjadinya kesenjangan, konflik, maupun disintegrasi, baik perorangan maupun antar kelompok.

Diperlukan suatu cara dalam memandang agama secara moderat. Moderat mengacu pada kata moderasi. Moderasi Beragama berasal dari kata “moderasi” dan “beragama”. Moderasi sendiri berasal dari bahasa latin yaitu *moderatio* artinya sedang, tidak kurang,

dan tidak lebih. Sementara dalam bahasa Inggris *moderation* berarti sebagaimana umumnya (rata-rata) dan tidak berpihak. Dilihat dari bahasa Arab, moderasi disebut sebagai *wasath* maupun *wasathiyah*. Artinya, tengah-tengah, imbang, dan adil. (Salamah, Nugroho, dan Nugroho, 2020). Moderasi beragama dimaknai sebagai perilaku dalam beragama secara seimbang. Arti kata “seimbang” memiliki makna suatu agama yang ia anut dengan agama yang dianut oleh orang lain bisa menempatkan diri secara pas dan seimbang. Tidak meninggikan agamanya sendiri maupun merendahkan agama yang dianut oleh orang lain. Bahkan penelitian yang dilakukan oleh (Zulfikar & Mutiara, 2019) menghasilkan bahwa terdapat dua hal pentingnya moderasi beragama, di antaranya: 1) hadirnya agama haruslah membawa misi rahmat menjunjung tinggi martabat manusia, 2) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara dengan aneka ragam perbedaan ras, suku, agama, etnis, budaya, bahasa daerah bahkan agama. Diperlukan suatu sikap, cara pandang dan perilaku toleransi yg tinggi untuk menjaga integrasi suatu bangsa agar tidak mudah terpecah.

Dalam (Muthohirin, 2017) menjelaskan bahwa ada dua fakta mendasar sebab keretakan hubungan antar umat beragama. Pertama, hadirnya di ruang publik suatu populasi agama yang dibarengi suatu bentuk nada kebencian, etnik, maupun ras dari pemeluk agama lainnya. Kedua, berkaitan dengan sempitnya cara dalam memandang agama. Ada perasaan paling benar dan sulit dalam menerima pendapat lain. Hadirnya moderasi beragama diharapkan mampu merangkul adanya bentuk perbedaan yang ada, salah satunya di dalam keberagaman beragama. Sebagai salah satu kota di Jawa Tengah yang penduduknya heterogen (campuran Cina, Jawa, Arab dan Keturunan) juga memiliki keberanekaragaman dalam beragama. Meskipun demikian, ternyata Kota Semarang merupakan kota yang damai ditinjau dari aspek kehidupan sosialnya. Hal itu menjadi faktor pendukung terciptanya suatu kondisi yg aman. Mendukung adanya upaya penerapan moderasi beragama belum optimal jika hanya dilakukan oleh satu individu, beberapa kelompok maupun beberapa agama saja.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam RPJMN Presiden Tahun 2020-2024, bahwa dalam menerapkan moderasi beragama membutuhkan dukungan ekstra dari berbagai pihak dan elemen masyarakat. Berasal dari hal itu, Kementerian Agama mencetuskan adanya moderasi beragama sebagai bentuk upaya pencegahan sekaligus penanggulangan. Fokus dari adanya program moderasi beragama ini adalah pendidikan dan pelatihan. Hal

itu yang kemudian mendasari organisasi-organisasi kemahasiswaan ikut mengambil andil di dalamnya. Diperjelas dalam penelitian (Sutrisno, 2019) bahwa langkah strategi dalam mewujudkan moderasi beragama dapat dilakukan salah satunya melalui pelibatan lembaga pendidikan maupun lembaga non formal lain yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, kerukunan beragama dan moderasi beragama. Melibatkan himpunan atau organisasi kemahasiswaan merupakan langkah strategis yang dinilai dapat membantu mewujudkan suatu bentuk moderasi beragama.

Beberapa penelitian terdahulu berkaitan dengan moderasi agama juga pernah dilakukan oleh Mahyuddin, M. (2020) berjudul Peran Strategis IAIN Ambon dan IAKN Ambon dalam Merawat Toleransi Sosial dan Moderasi Beragama di Ambon Maluku mengungkapkan bahwa penelitian yang diperoleh dari paradigma deskriptif kualitatif dengan studi kasus menghasilkan pentingnya peran lembaga pendidikan tinggi yaitu IAIN dan IAKN di Ambon dalam menanamkan nilai toleransi dan moderasi beragama. Sehubungan dengan hal tersebut penelitian ini juga berkaitan tentang peran organisasi kemahasiswaan lintas agama yang ada di Kota Semarang dalam mewujudkan moderasi beragama di tengah masyarakat yang majemuk.

Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan melibatkan peran mahasiswa yang bersinggungan secara langsung dengan moderasi beragama melalui himpunan atau organisasi kemahasiswaan di luar kampus. Organisasi kemahasiswaan ini memiliki fokus, isu dan dekat terhadap pembahasan moderasi beragama. Terdapat enam organisasi kemahasiswaan Kota Semarang yang dikaji dalam penelitian ini di antaranya: 1) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), 2) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), 3) Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), 4) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), 5) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan 6) Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia PMKRI).

Keberadaan mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan yang dijalankan merupakan suatu alat untuk mewujudkan moderasi beragama di tengah sistem sosial yang majemuk. Sebagai civitas akademis yang memiliki intelektual tinggi diharapkan mampu membawa nilai-nilai moderasi tersebut dan menerapkannya (Fathoni, I. S., 2022). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengembangan moderasi beragama melalui peran dari himpunan atau organisasi kemahasiswaan ekstra kampus di Kota Semarang. Selanjutnya, melalui eksplorasi pengetahuan moderasi beragama pada masing-masing

organisasi kemahasiswaan dibuat suatu model pengembangan berdasarkan data lapangan dan hasil analisis.

Secara keseluruhan dalam berbagai sumber *literature* maupun penelitian-penelitian terdahulu sudah dilakukan berkaitan dengan penerapan maupun pemahaman moderasi beragama. Salah satunya di kalangan organisasi kemahasiswaan lintas agama. Penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian sebelumnya yang masih kurang komprehensif berkaitan dengan moderasi beragama. Dalam penelitian terdahulu maupun *literature* terkait hanya mengkaji dari satu objek maupun lembaga yang berkaitan dengan moderasi beragama. Penelitian merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya dan berusaha untuk mengkaji dan meneliti tentang penerapan moderasi beragama bukan hanya dari satu persepsi, melainkan mengkaji secara *holistic* dan komprehensif dari berbagai organisasi mahasiswa lintas agama di kota Semarang. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model moderasi beragama di organisasi mahasiswa lintas agama yang bisa diimplementasikan secara konkret. Sehingga, adanya penelitian ini sangat *urgent* untuk dilakukan sebagai bentuk pembaharuan dan pengembangan dari ilmu pengetahuan terhadap hasil penelitian sebelumnya.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai pengembangan model moderasi beragama di kalangan organisasi mahasiswa lintas agama di Kota Semarang dalam mewujudkan moderasi beragama ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2007: 1), metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah dan menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian ini dilakukan mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan yaitu peneliti menyusun instrumen pertanyaan, melakukan observasi, wawancara secara langsung, melakukan dokumentasi arsip data-data organisasi mahasiswa lintas agama berkaitan dengan moderasi. Sumber data penelitian ini ada dua yaitu data primer dan sekunder. Data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara maupun dokumentasi dilakukan uji validitas data dengan teknik triangulasi sumber data. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yaitu dengan menentukan narasumber yang diwawancara dalam

penelitian moderasi beragama pada organisasi kemahasiswaan lintas agama di Kota Semarang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dalam penelitian. Analisis data dilakukan dengan reduksi data yaitu mulai dari wawancara, pencatatan dan rekaman hasil wawancara, coding (transkip hasil wawancara), kemudian dilakukan analisis data yang bersifat deduktif. Tahap terakhir dalam metode penelitian ini adalah penarikan simpulan dilakukan setelah dilakukan pengujian dan analisis data secara sistematis.

III. PEMBAHASAN

Peran Organisasi Kemahasiswaan dalam Moderasi Beragama

Penelitian ini mengacu pada salah satu teori yang cukup terkenal yaitu teori fungsional struktural (*structural fungsional*) oleh Talcott Parson. Di dalam teori ini, masyarakat di definisikan sebagai suatu sistem sosial yang menyeluruh. Masyarakat adalah bagian dari kumpulan sistem kecil seperti pendidikan, keluarga, agama, pemerintah, dan sebagainya. Talcott Parson memproyeksikan kehidupan komunitas sebagai sistem sosial. Sistem sosial adalah bagian dari sistem operasi yang lebih luas. Menurut pengertian konsep sistem fungsional ini dapat ditelaah, bahwa setiap orang memiliki perilaku yaitu totalitas gerak motorik, persepsi dan fungsi kognitifnya. Dalam teorinya, Parson mengembangkan empat komponen untuk menjaga keutuhan dari sistem sosial pada kehidupan bermasyarakat. Keempat komponen tersebut biasa disingkat dengan AGIL (*Adaptation, Goal, Integration, Latency*) yakni sebagai berikut:

1. *Adaptation* (Adaptasi), yaitu kemampuan individu atau masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Sehingga ia bisa melakukan adaptasi dengan baik dan merasa nyaman terhadap kondisi yang terjadi di lingkungan tersebut. Adaptasi penting agar masyarakat bisa membangun suatu sistem sosial yang terstruktur.
2. *Goal* (Tujuan), yaitu kemampuan yang harus dimiliki masyarakat dalam merencanakan tujuan-tujuan yang ingin dicapainya dan menyusun strategi untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut. Pada saat menghadapi masalah dalam proses mencapai tujuan, masyarakat perlu menemukan solusi agar *goal* yang dicapai bisa terjadi.
3. *Integration* (Integrasi), yaitu faktor penting untuk mewujudkan keutuhan dan persatuan dari tiap-tiap komponen yang ada dalam sistem sosial masyarakat. Proses pengintegrasian

dimulai dengan pemberlakuan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Hal ini berguna sebagai kontrol sosial masyarakat, sehingga mampu menjaga keutuhan antar komponen sistem sosial. Anggota masyarakat diharapkan bisa mematuhi kesepakatan yang telah dibuat dan menjaganya sehingga tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

4. *Latency* (Pemeliharaan pola), yaitu pemeliharaan terhadap pola-pola yang sudah terbentuk di masyarakat. Pemeliharaan meliputi menjaga, memelihara, mengevaluasi dan memperbaiki pola. Dalam hal ini pola yang dimaksud adalah budaya, nilai dan norma, bahasa, adat istiadat dan lain sebagainya.

Teroi struktural fungsional ini termasuk teori yang bersifat empiris, ideal dan positivistis. Dengan mengasumsikan bahwa tindakan manusia itu bersifat volunteeristik atau sukarela. Artinya tindakan-tindakan tersebut dilakukan dengan memperhatikan nilai dan norma yang telah dibuat bersama-sama. Untuk menwujudkan suatu tujuan yang ingin dicapai. Dalam memilih sarana dan tujuan ini akan dipengaruhi oleh lingkungan dan berbagai kondisi yang mungkin terjadi. Berkaitan dengan teori Talcott tersebut, konsep moderasi beragama merupakan suatu nilai yang ingin ditanamkan pada sistem sosial yang ada di masyarakat. Dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan Teori Talcott Person, sistem sosial yang ingin difokuskan adalah pada pendidikan tinggi dengan subjeknya adalah peran organisasi kemahasiswaan lintas agama dalam mewujudkan moderasi beragama. Untuk mengembangkannya dilakukan sosialisasi yang terstruktur pada mahasiswa itu sendiri. Sehingga mereka mampu memahami makna dari moderasi. Puncak sistem sosial organisasi kemahasiswaan ini diharapkan ada peran mereka dalam mewujudkan moderasi beragama yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.

Menurut Organisasi kemahasiswaan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di Semarang bahwa Indonesia adalah beragam. Termasuk di dalamnya agama. Di Indonesia, mayoritas masyarakatnya beragama Islam yang rata-rata taat pada agamanya. Biasanya, pada saat orang-orang ditimpa suatu masalah atau musibah dalam emosi maupun psikologisnya, ia akan mendekatkan diri kepada Tuhan (perilaku lebih religius). Sebagai masyarakat yang tinggal di negara yang heterogen, dampak yang diterima di dalam kehidupan sehari-hari yaitu sering ditemui perbedaan-perbedaan. Salah satunya adalah perbedaan agama dan keyakinan. Moderasi ingin menarik dari ujung

ke ujung lain menuju ke tengah. Islam sendiri sudah moderat, sudah mengakomodir semua hal dan cara-cara bermuamalah pun telah diatur. Termasuk bagaimana cara bergaul dengan orang yang berbeda keyakinannya. Di Cabang organisasi KAMMI ada setidaknya beberapa kegiatan yang mengarahkan pada moderasi meskipun secara tidak langsung. Di antaranya, sebagai berikut:

Kaderisasi (Kaderisasi ini dilakukan sebagai bentuk pengembangan sumber daya manusia strategis, pengembangan komisariat, serta bagian dari pemberdayaan SDMnya).

Kegiatan di Sosmas (Di dalam kegiatan inilah yang lebih banyak nilai moderasinya. Hal itu dikarenakan bersinggungan atau dekat dengan kehidupan sosial masyarakat. Contohnya, memberi bantuan tanpa memandang identitas yang ditolong) atau melakukan kegiatan kemanusiaan yang bermanfaat tanpa membeda-bedakan suku, golongan, ras, maupun agama.

Organisasi KAMMI dalam mendiskusikan perihal keagamaan tidak dilakukan secara khusus. Setidaknya, dilakukan moderasi beragama di dalam organisasi melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam program-program kerja. Salah satunya melalui kegiatan-kegiatan diskusi. Adapun partisipasi aktif dari peserta sasaran terhadap kegiatan bisa dikatakan mengalir dan fleksibel. Tergantung kepada isu apa yang akan dibahas dan *relatable*-nya dengan zaman sekarang. Adapun visi secara khusus dari organisasi KAMMI adalah menjadi wadah perjuangan permanen dalam menciptakan kader pemimpin dalam upaya mewujudkan negara dan bangsa yang Islami. Misinya kurang lebih ada lima atau enam karena di cabang memiliki visi/misi sendiri. KAMMI memiliki filosofi gerakan yaitu gerakan-gerakan KAMMI (FGK) dengan 7 instrumen seperti Visi, misi, paradigma gerakan, karakteristik, kredo, prinsip dan asas-asas gerakan. Melalui itu kemudian moderasi beragama organisasi ini mencoba mengaplikasikan.

Kedua adalah moderasi beragama dalam perspektif GMNI. Moderasi beragama bukanlah hal baru. Sebagai orang Indonesia yang beragam, moderasi beragama menjadi salah satu bagian yang tidak terlepas. Majoritas agama masyarakat Indonesia adalah Islam. Meskipun demikian, ada pula pemeluk-pemeluk dari agama lain dan perbedaan-perbedaan yang ada merupakan suatu hal yang wajar dan bukan hal baru. Setiap perbedaan yang ada bahkan di antara sesama individu maupun kelompok tidak menjadikan perbedaan itu benar-benar ada. Artinya perbedaan tersebut dipandang sebagai suatu bentuk kekuatan sekaligus bentuk persatuan. Urusan terkait dengan agama itu

bersifat privat antara makhluk dengan Tuhan. Bukan menjadi urusan manusia untuk saling menghakimi bagaimana cara seseorang berhubungan dengan Tuhan. Hal itu disebabkan pada saat seseorang mencampurinya, maka secara tidak langsung orang tersebut telah bertolak belakang dari apa yang ia sendiri katakan. Persoalan moderasi beragama juga berkaitan dengan perayaan hari-hari besar tertentu. Pengimplementasian dari moderasi beragama itu ialah mempersilahkan masing-masing individu merayakan hari besarnya. Boleh berbagi tanpa harus meyakini. Artinya pada saat berbagi itu adalah sebuah cara untuk bersyukur dan berbagi kebahagiaan. Di dalam agama mana pun senantiasa diajarkan untuk toleransi dan saling menghargai. Tidak dibenarkan seseorang dalam menghakimi bagaimana seseorang manusia lain dalam hal peribadatannya karena itu sifatnya privat.

Di dalam memandang moderasi beragama, organisasi kemahasiswaan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia di Semarang (GMNI) tidak diklasifikasikan sebagai organisasi yang berbasis keagamaan. Artinya, tidak berdasarkan identitas suku, ras, utamanya agama. Organisasi kemahasiswaan GMNI sendiri merupakan buah dari pemikiran *founding father* yang dikenal sebagai Bung Karno (Ir. Soekarno). Berdasarkan asas dan doktrin perjuangan yang digunakan di dalam gerakan organisasi kemahasiswaan GMNI ini berbentuk Marhaenisme. Marhaenisme merupakan sebuah ideologi yang menentang segala hal yang berbentuk penindasan atas manusia maupun suatu bangsa. Organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia di Semarang ini tidak memasukkan unsur agama apapun ke dalam pergerakan organisasinya. Organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia di Semarang telah mengadopsi pemikiran dari Bung Karno, mengimani dan meyakini pemikirannya. Termasuk di dalamnya tentang Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam proses “Pekan Penerimaan Anggota Baru” di GMNI Semarang misalnya, suatu kegiatan yang hampir sama seperti Maperca “Masa Penerimaan Calon Anggota”. Di dalam kegiatan tersebut terdapat materi-materi wajib yang harus disampaikan. Tujuan dari materi itu berfokus pada bagaimana proses nasionalisme di Indonesia lahir.

Dasar dari gerakan yang ada di organisasi kemahasiswaan GMNI Semarang ini adalah Marhaenisme. Sehingga, mengacu kepada hal itu, segala bentuk kegiatan, program kerja, arah gerakan, dan *output* karakter yang dihasilkan adalah menolak segala macam dan bentuk tindakan penindasan, utamanya penindasan terhadap kemerdekaan dalam

berpikir dan beragama. Di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Semarang, terhitung sejak tahun 2000, ketua umum yang menjabat ialah beragama Islam. Artinya kurang lebih selama 23 tahun hingga 2023 per Desember ini, barulah ketua umum di GMNI Semarang beragama non Islam atau Kristen. Hal itu bukan berarti bermaksud penghinaan terhadap agama, akan tetapi merupakan bentuk dan wujud toleransi dan moderasi dalam implementasi konkritnya.

Setiap manusia memiliki cara maupun sudut pandang sendiri dalam memaknai moderasi beragama. Hal itu adalah bagian dari hak asasi manusia, yaitu hak untuk berpendapat dan memilih bagaimana kemudian mereka memaknai sesuatu dan merdeka dalam berpikir. Manusia yang sudah menjadi anggota atau bagian dari masyarakat sudah dianggap dewasa dan memiliki pertimbangan pada saat mengambil suatu tindakan. Ketika ada seseorang maupun sekelompok yang kemudian dinilai melenceng atau keluar dari kebiasaan, maka akan dipersilakan. Ditinjau dari pemahaman logika, dengan tidak mencampuri urusan agama orang lain adalah bagian dari moderasi itu sendiri. Memaknai moderasi beragama ini, ujung dari kepercayaan yang dijadikan dasar dalam moderasi beragama, yaitu masing-masing individu sama-sama meyakini di ujung persimpangan jalan yang paling jauh. Adapun hambatan yang muncul dari adanya pelaksanaan moderasi beragama ialah kesadaran pribadi. Seseorang yang belum siap secara dewasa dalam menerima perbedaan. Fakta menariknya bahwa pendidikan rendah atau kurang bukanlah satu-satunya faktor yang bisa dijadikan acuan sulitnya mengimplementasikan moderasi beragama itu sendiri.

Ketiga ialah dari perspektif HMI. Dalam pemaknaan moderasi beragama, HMI memiliki perspektif dalam arti sempit dan luas. Dimaknai dalam arti sempit, maka moderasi beragama moderasi beragama dilihat sebagaimana masyarakat di Jawa. Pertama ditinjau dari moderasi beragama yang ada di suku Jawa. Suku Jawa yang memiliki posisi strategisnya di Indonesia dimana mayoritas penduduknya memeluk agama Islam sangat terbuka terhadap pendatang atau orang yang baru tinggal di Jawa, yang mana identik daerah asalnya bukan Islam. Bahkan ada di daerah asal yang masih memeluk keyakinan yang disebut sebagai keyakinan leluhur. Keyakinan itu disebut sebagai keyakinan Paremali. Keyakinan Paremali adalah keyakinan leluhur yang mana di dalam praktik peribadatannya hampir sama seperti Islam, yaitu memakai sorban dan sarung. Pengimplementasian moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari bisa dilakukan

dengan berteman dan berdiskusi secara terbuka dengan mereka yang bukan satu agama atau keyakinan. Dari hal tersebut, kita dapat mengetahui apa saja yang ada di dalam catatan sejarah agama mereka, hanya cukup tahu tanpa harus meyakini. Di dalam ruang lingkup keorganisasian, praktik dalam bermoderasi agama jelas terlihat dari acara-acara diskusi yang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi kemahasiswaan lintas agama. Moderasi dalam beragama adalah toleransi dalam hal keyakinan kegiatan, akan tetapi dengan tidak merugikan satu sama lain.

Di dalam praktek kehidupan sehari-hari yang terlihat akhir-akhir ini adalah seringnya terjadi kerugian oleh salah satu pihak terkait. Akibatnya terjadilah yang disebut sebagai konflik agama. Itulah yang seharusnya diminimalisasi atau harus dikurangi sedikit demi sedikit terkait konflik beragama. Dampak dari hal tersebut jika sudah sampai pada konflik agama, maka besar kemungkinan potensi terjadinya pertumpahan darah. Inilah yang disebut sebagai fanatik dalam bermoderasi beragama serta sudah melenceng dari esensi moderasi beragama itu sendiri. Di dalam organisasi HMI, beragama saat ini sama seperti ketika menghadiri undangan lembaga sebuah diskusi. Sebagai kader organisasi kemahasiswaan di Semarang, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Semarang berupaya mewujudkan semangat pemikiran pembaruan Islam yang tidak hanya sampai di kultural yang dipakai dari segi kaderisasi pun disampaikan kepada kader. Ialah yang dimaksud adalah semangat pembaruan ala Himpunan Mahasiswa Islam. Sering diidentifikasi dengan semangat KeIslam dan KeIndonesiaan. Kedua hal ini saling berjalan bersama yang diibaratkan seperti dua sisi. Apabila hanya berjalan salah satu, misalnya hanya Islamnya saja tanpa ada Indonesia-nya maka kurang di Himpunan Mahasiswa Islam. Demikian keduanya harus berjalan bersama-sama.

Adapun beberapa kegiatan moderasi beragama di ruang lingkup organisasi kemahasiswaan di Himpunan Mahasiswa Islam Semarang ini, di antaranya kegiatan sosial. Pembagian dan bantuan yang diberikan serta kolaborasi yang dibangun bersama Dinas Sosial untuk masyarakat setempat dalam rangka Galang Dana kegiatan sosial. Dalam hal ini, mahasiswa yang lebih banyak berpartisipasi. Selain itu, kegiatan lain yang berkaitan dengan moderasi beragama adalah kegiatan yang berkaitan dengan kemahasiswaan dan pesantren. Ada beberapa faktor yang mendorong para kader di Himpunan Mahasiswa Islam Semarang bisa mengikuti moderasi beragama di antaranya; (1) Adanya penanaman nilai-nilai keIslam. Seandainya seorang kader HMI selesai di

rukun iman dan rukun Islam, maka kader tersebut saling menerima, (2) Ditinjau dari aspek atau sisi keIndonesiaan, maka akan kembali lagi, adanya penekanan pada pernyataan bahwa Indonesia ini bisa lahir seperti sekarang ini adalah atas dasar perjuangan siapa saja. Dari hal tersebut kemudian memunculkan pertanyaan apakah cuma sebatas Islam saja atau hanya sebatas kelompok tertentu?. Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa semangat perjuangan seperti dulu harus tetap ada dan perjuangan-perjuangan terdahulu harus tetap disampaikan kepada generasi sekarang.

Ditinjau dari pemahaman organisasi HMI, adanya hambatan dalam mewujudkan moderasi beragama di antaranya karena beberapa hal berikut, seperti; (1) Adanya istilah hanya sebatas labeling saja. Sehingga, setiap kampanye yang dilakukan hanya dianggap sebagai suatu bentuk kampanye formalitas belaka. Artinya, kampanye yang dilakukan hanya sebagai bentuk kampanye dengan sedikit aktualisasi praktik. Dampaknya, menghambat aktualisasi bermoderasi agama, (2) Sulitnya penerimaan dari masyarakat. Hal ini karena tidak semua masyarakat awam utamanya bisa dan mau memahami dengan mudah terkait informasi. Harus ada semacam pembahasan yang lebih halus kepada masyarakat awam. Hal yang bisa dilakukan adalah dengan penggunaan bahasa yang lebih sederhana dan mudah diterima oleh masyarakat awam.

Keempat, moderasi beragama dalam perspektif PMII. Moderasi asal katanya adalah moderat. Agama dalam konteks moderasi beragama memiliki pemahaman atau pengertian bahwa ada sisi pada saat seseorang berada di tengah-tengah. Moderat memiliki dua kata kunci utama yaitu adil dan seimbang. Sehingga moderasi beragama bisa dimaknai sebagai sebuah cara masyarakat untuk bersosialisasi dengan memandang agama lain secara moderat. Selain itu, moderasi beragama juga ditandai dengan ketetapan dalam berpegang teguh pada agama yang diyakini. Agama dalam pemahaman moderasi beragama ini diartikan sebagai suatu cara memandang agama lain dalam ranah kehidupan masyarakat dan kemanusiaan. Pada intinya, semua agama mengajarkan kebaikan.

Di Indonesia khususnya, konsep moderasi beragama bisa kuat dengan adanya semboyan yang disebut “Bhinneka Tunggal Ika” dan sebuah pedoman bernegara “Pancasila”. Moderasi adalah tengah. Akan tetapi, tengah ini bisa diartikan tengah ke kanan maupun tengah ke kiri. Sehingga, moderasi itu harus benar-benar di tengah tidak condong ke kiri maupun condong ke kanan. Di organisasi PMII sudah tertuang nilai-nilai yang dikenal Tri Komitmen. Tri Komitmen ini terdiri dari kebenaran, kejujuran, dan

keadilan dalam menyikapi moderasi beragama. Moderasi beragama di dalam Islam lebih dikenal dengan istilah tasamuh dan tawasuth. Secara harfiah tasamuh berasal dari kata “samhan” artinya kemudahan dan memudahkan. Sedangkan, tawasuth adalah sikap tengah-tengah. Perlunya moderasi beragama adalah antara perlu dan tidak perlu. Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tentu moderasi beragama itu diperlukan. Apabila, di dalam praktiknya, moderasi ini hanya berupa konsep saja maka pemahaman masyarakat mudah diserang. Ditinjau dari sisi unsur politiknya, pun melihat adanya pemilu 2024 yang semakin dekat, kebijakan moderasi beragama sebagai salah satu hal yang mungkin sebagai langkah Pemerintah untuk merukunkan masyarakatnya. Sehingga, pada dasarnya ada manfaat yang bisa diperoleh melalui adanya kebijakan ini. Moderasi juga digunakan sebagai perisai dalam mempertahankan eksistensi kebudayaan lingkungan, sehingga bukan hanya persoalan agama saja.

Kepengurusan yang ada di organisasi PMII Semarang terdiri dari beberapa struktur kepengurusan inti seperti: Ketua Umum, Ketua 1 Internal, Ketua 2 Eksternal, Ketua 3 Keagamaan, dan KOPRI (Korps PMII Putri). Ada 4 jenjang di PMII: (1). MAPABA (Masa Pengenalan Anggota Baru), (2). PKD (Pelatihan Kader Dasar), (3). PKL (Pelatihan Kader Lanjut), (4). PKN (Pelatihan Kader Nasional). Yang mana dalam pelatihan kader ini para fasilitator menambahkan nilai-nilai moderasi beragama secara tidak langsung. Kemudian PMII juga membentuk suatu kelas yang mendatang pemateri dari luar untuk membahas terkait sosialisasi moderasi beragama pada mahasiswa. Dalam PMII juga terdapat kelas ekologi politik, berdiskusi mengenai politik yang berkelanjutan dengan memperhatikan lingkungan. Selain itu juga ketika dalam forum peserta harus saling mendukung dengan tidak memandang latar belakang, silaturahmi/berteman tanpa memandang agamanya dan bersosialisasi dengan baik, kegiatan dengan tidak mengganggu waktu beribadah kita ataupun mereka yang berbeda keyakinan.

Kelima, pemahaman moderasi beragama dalam perspektif organisasi IMM. Moderasi beragama sebenarnya mencoba menempatkan agama di tengah-tengah dan tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan Rasulullah SAW. Dengan tidak saling menjatuhkan, menghina dan menyakiti. Intinya moderasi beragama adalah gerakan yang dibangun untuk kemaslahatan bersama. Moderasi beragama memandang agama itu penting akan tetapi tidak mengenyampingkan kepentingan bersama. Sehingga tidak hanya berfokus pada kegiatan ibadah saja, melainkan karena aktivitas sosial juga.

Moderasi beragama berarti memiliki sudut pandang yang luas dalam memandang segala sesuatu. Moderasi tidak berkutat dengan religius saja tetapi juga berkaitan dengan *habluminannas*, dengan tidak mengaitkannya dalam lingkup politik. Tergantung pada pemaknaan dan tempatnya. Karena sebenarnya moderasi itu rekonsepsi yang dibangun ulang lalu di branding dengan hal baru. Sejatinya Islam sudah mengajarkan tentang moderasi. Moderasi beragama itu penting karena toleransi sendiri merupakan bagian dari agama Islam. Konsep ini sebagai semangat baru. Semua program IMM memiliki tujuan untuk moderasi beragama. Program yang ada di IMM untuk moderasi beragama sendiri tergantung kepada komisariat karena masing-masing memiliki ciri khasnya sendiri. Biasanya moderasi beragama akan dipegang oleh bidang Sosial Pemberdayaan Masyarakat (SPM). Baru-baru ini dari komisariat UNNES Cokro sudah melakukan diskusi dengan organisasi PMKRI.

Adapun bentuk pengimplementasiannya sebagai berikut:

1. Pada saat Pemira mencoba memposisikan diri berada ditengah-tengah.
2. Tidak mempermasalahkan hal-hal sepele yang bisa menyebabkan perselisihan. baik itu antar agama maupun lintas agama.
3. Memiliki sudut pandang yang luas.
4. Jangan memiliki musuh walaupun karena adanya kesenjangan dan ketidakadilan.

Penerapan Moderasi Beragama di dalam Organisasi IMM:

1. Diskusi untuk umum LPIK (tingkat kota) banyak partisipasinya.
2. Diskusi untuk komisariat.
3. Keanggotaan IMM terbuka untuk siapa saja.
4. Membuat projek bersama PMII, GMNI dan HMI untuk menciptakan ruang publik untuk belajar.

Di dalam IMM sendiri merujuk pada pendapat 4 imam madzhab tidak hanya satu. Ada trilogi yang dijadikan dasar IMM, di antaranya: (1) keagamaan; (2) kemahasiswaan; (3) kemasyarakatan. Seringkali dalam moderasi beragama religiusitas dan intelektualitas disalahartikan. Apabila ada anggota maupun kader IMM menyimpang dari perwujudan moderasi beragama yaitu dengan menegur dan membimbing agar mengetahui konsep moderasi beragama yang sesuai serta berusaha untuk bisa memperbaiki. IMM juga mulai

menyosialisasikan moderasi beragama di media sosial sebagai salah satu bentuk pengimplementasian dan edukasinya.

Terakhir, yaitu perspektif PMKRI dalam memandang moderasi beragama. Moderasi beragama sebagai individu dan juga sebagai orang yang berada dalam organisasi itu seperti apa? Moderasi beragama bermula dari harapan dan cara pandang menerima segala keputusan. Pemeluk agama saling mengirim nilai-nilai dari agama yang dianut oleh masing-masing pemeluk, mulai dari moral, etika dan lain sebagainya. Moderasi beragama berarti juga menerima dan menghargai setiap nilai dari masing-masing agama karena sebuah organisasi tidak bisa berdiri sendiri tanpa organisasi lain. Moderasi beragama dalam hal tersebut sangat kita butuhkan. Orang-orang dari berbagai latar belakang keyakinan memperkaya isi dari PMKRI itu sendiri. PMKRI memiliki visi-misi dimana nilai-nilai yang ada di agama lain itu turut memperkaya atau mempengaruhi visi dan misi PMKRI. Pengimplementasian dari moderasi beragama bisa dilihat dari contoh berikut ini; Seseorang yang dari kecil sampai dewasa tinggal di ruang lingkup yang mayoritasnya tidak beragama sama dengan dirinya. Dari peristiwa tersebut ia mampu beradaptasi dan menjunjung tinggi toleransi. Berdasarkan kasus tersebut, seseorang bisa belajar untuk menghargai orang-orang yang berbeda agama. Setidaknya, ada satu hal menarik dari adanya perbedaan yang ada, yaitu perbedaan bukanlah alasan yang sebenarnya untuk menjadikan seseorang maupun kelompok merasa lebih baik dari yang lain. Dalam rangka mewujudkan atau mengimplementasikan moderasi beragama dapat dilakukan melalui cara melakukan kegiatan atau hal menarik bagi anak muda. Kegiatan tersebut dapat dilakukan di kalangan anak muda dengan kegiatan moderasi beragama yang menyenangkan, salah satu tujuannya adalah ketika bercanda untuk mencairkan suasana, tidak ada orang yang tersinggung. Salah satu puncak tertinggi dari moderasi beragama yang harus diketahui adalah dengan tidak memaksakan kehendak atau pandangan pribadi.

Pengembangan Model Moderasi Beragama di Kalangan Organisasi Kemahasiswaan Lintas Agama di Kota Semarang

Moderasi Beragama berdasarkan Karakter Bangsa

Kementerian Agama Republik Indonesia dalam (Tohor & Tirmizi, 2019) menetapkan empat karakteristik moderasi beragama yang sesuai dengan bangsa

Indonesia, diantaranya adalah; (1) Komitmen kebangsaan; (2) Toleransi; (3) Anti kekerasan; dan (4) Kearifan lokal. Dari keempat karakteristik moderasi beragama tersebut semuanya harus bisa terpenuhi agar suatu tindakan bisa dikatakan moderasi beragama. Komitmen kebangsaan dimaksudkan agar tindakan moderasi beragama ini diniatkan untuk memenuhi kewajiban warga negara Indonesia dalam menjunjung persatuan dan kesatuan.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan diketahui bahwa pada dasarnya semua organisasi memiliki nilai moderasi beragama yang ditanamkan dalam jiwa keorganisasian yang mereka ikuti. Namun tidak diungkapkan secara tersurat bahwa kegiatan-kegiatan tersebut bertemakan moderasi beragama. Keenam organisasi kemahasiswaan di Kota Semarang (KAMMI, PMII, HMI, IMM, PMKRI dan GMNI) memiliki cara pandang sendiri dalam menanggapi moderasi beragama. Tetapi sejauh ini aktualisasi yang mereka ungkapkan kepada kami sama terkait bagaimana pola moderasi beragama yang sering mereka lakukan, misalnya adalah membuka forum-forum diskusi umum.

Penelitian ini berusaha untuk menemukan konsep pengembangan model moderasi beragama yang sesuai sehingga nantinya bisa dikembangkan dan diterapkan oleh keenam organisasi kemahasiswaan di Kota Semarang maupun organisasi-organisasi lain. Untuk itu penelitian menetapkan karakteristik yang disosialisasikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai bahan pengembangan dalam membentuk suatu model moderasi beragama yang sesuai. Maka moderasi beragama harus memenuhi hal-hal berikut:

Komitmen Kebangsaan

Sebagai Warga Negara Indonesia kewajiban kita sudah terikat dengan adanya ideologi yang kita junjung sejak lama yakni Pancasila dan UUD 1945. Segala tindakan dan perilaku seharusnya berpedoman pada dua hal tersebut. Sama halnya dengan moderasi beragama yang sejatinya secara yuridis sudah terkandung dalam UUD 1945 Pasal 29 Ayat 2 terkait kebebasan beragama bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Moderasi beragama sudah tertanam dalam nilai-nilai Pancasila salah satunya pada poin satu yang berbunyi “KeTuhanan Yang Maha Esa”. Jadi

gagasan mengenai moderasi beragama bukan lagi hal yang baru bagi masyarakat Indonesia.

Kemudian dalam kehidupan kemahasiswaan pengetahuan dasar terkait ideologi Pancasila dan UUD 1945 adalah hal yang sering dijumpai terutama dalam kelas-kelas mata kuliah umum yang wajib untuk ditempuh. Sehingga komitmen kebangsaan sudah biasa diterapkan dalam perilaku mahasiswa. Sama halnya ketika mahasiswa masuk kedalam organisasi, nilai-nilai moderasi beragama sudah sewajarnya tertanam di dalam perilaku mereka ketika menghadapi suatu perbedaan agama, keyakinan dan pendapat. Karena sejak dahulu masyarakat Indonesia itu majemuk dengan corak perbedaan yang bermacam-macam yang mengikat mereka dalam komitmen kebangsaan.

Toleransi

Menghargai dan saling memelihara kerukunan merupakan kunci utama untuk menciptakan kondisi sosial masyarakat yang damai dan aman. Menghadapi perbedaan keagamaan dan keyakinan harus dilakukan dengan menunjukkan sikap toleransi (menghargai), tujuannya untuk mencegah dampak negatif terhadap kerukunan sosial antar masyarakat. Moderasi beragama sering kali disamakan dengan toleransi. Pada dasarnya keduanya sama akan tetapi pemerintah mengkonsep gagasan moderasi beragama lebih luas dibanding dengan toleransi. Dengan menyesuaikan moderasi beragama yang sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan yang dimiliki.

Anti Kekerasan

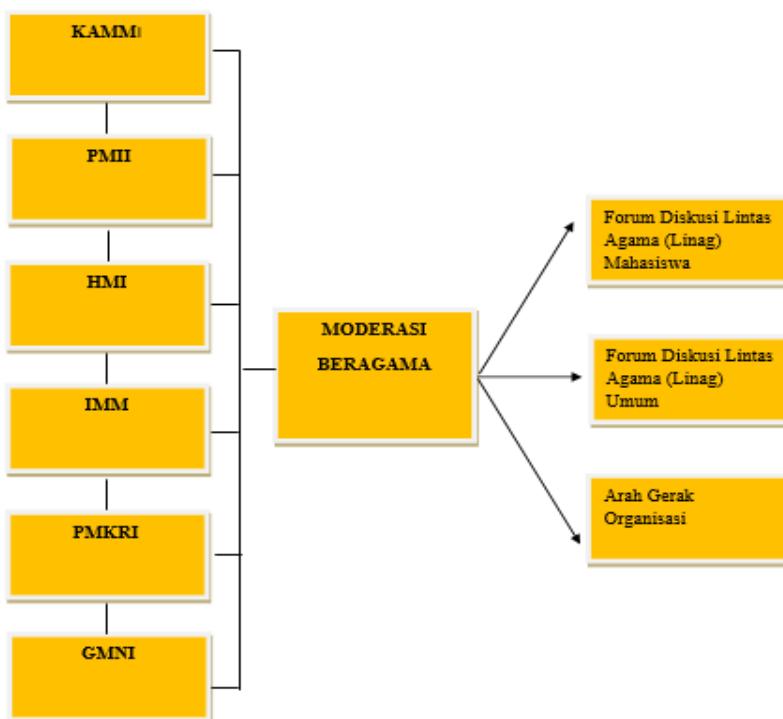
Dalam bermoderasi khususnya agama, kekerasan merupakan hal yang sangat dihindari walaupun diniatkan dengan tujuan tertentu. Misalnya ketika ada sekelompok orang atau individu tidak mau menerapkan moderasi beragama kemudian ada seseorang yang memaksa mereka untuk memahami dan melakukan moderasi beragama dengan jalan kekerasan ataupun ancaman, maka perilaku yang dilakukan orang tersebut adalah salah meski tujuan yang ingin dilakukannya adalah untuk menegakkan nilai-nilai moderasi.

Kearifan Lokal

Masyarakat yang majemuk memiliki nilai dan norma yang beragam di setiap daerahnya. Kita dalam melakukan moderasi beragama perlu menyesuaikan dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Tentunya semangat melakukan

moderasi beragama adalah suatu keniscayaan yang harus diterima. Sebagai warga negara Indonesia sikap saling menghormati, menghargai, kesetaraan dan keadilan dalam berperilaku merupakan bagian untuk mendukung gagasan moderasi lebih sesuai. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa moderasi beragama yang ada di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri yang disesuaikan dengan kondisi sosial, lingkungan dan sejarah bangsa.

Model Pengembangan Moderasi Beragama di Lingkup Organisasi Kemahasiswaan Lintas Agama



IV. SIMPULAN

Organisasi kemahasiswaan lintas agama memiliki peran strategis dalam mewujudkan moderasi beragama. Hal tersebut dilihat dan diketahui melalui kegiatan penelitian yang menunjukkan adanya arah gerak, visi misi, tujuan dan berbagai program serta nilai-nilai di dalam organisasi kemahasiswaan tersebut yang mendorong implementasi moderasi beragama. Semua hal tersebut mengacu baik yang secara langsung maupun tidak langsung pada perwujudan moderasi beragama bagi organisasi kemahasiswaan lintas agama di lingkup Kota Semarang pada khususnya. Masing-masing organisasi

kemahasiswaan lintas agama yang ada di Kota Semarang memiliki cara pandang yang berbeda di dalam memaknai moderasi beragama. Diantaranya diketahui dari visi misi organisasi, arah gerak organisasi dan pedoman yang digunakan atau diyakini dalam masing-masing organisasi. Meskipun demikian, keenam organisasi tersebut meyakini bahwa moderasi beragama adalah suatu hal penting dan mendasar di tengah-tengah keanekaragaman Indonesia saat ini khususnya. Dengan demikian, maka diperlukan model moderasi beragama yang disusun berdasarkan hasil penelitian bahwa perwujudan moderasi dapat dilakukan dengan tiga model meliputi: 1. Forum Diskusi Lintas Agama (LINAG) Mahasiswa 2. Forum Diskusi Lintas Agama (LINAG) Umum 3. Arah Gerak Organisasi. Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian diharapkan bisa memberikan manfaat dalam menambah khazanah ilmu pengetahuan. Selain itu, model moderasi yang dibuat dalam penelitian ini bisa dikembangkan secara luas oleh lembaga pendidikan, pemerintah maupun masyarakat. Sehingga mampu memberikan dampak positif terhadap perwujudan moderasi beragama yang sesuai dengan nilai dan norma masyarakat Indonesia.

Daftar Pustaka

- Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2022). Peta Persebaran Agama Provinsi 2022
- Fathoni, I. S. (2022). Analisis Upaya Uin Raden Mas Said Dalam Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Di Era Modern. *In International Conference on Cultures & Languages (ICCL)* (Vol. 1, No. 1, pp. 625-642).
- Mahyuddin032, M. (2020). Peran Strategis IAIN Ambon dan IAKN Ambon dalam Merawat Toleransi Sosial dan Moderasi Beragama di Ambon Maluku. *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*,13 (1), 103-124.
- Muthohirin, Nafik (2017). Sindo News “Islam Wasathiyah sebagai Jalan Dialog Agama” Diakses dari <https://nasional.sindonews.com/berita/1303548/18/islam-wasathiyah-sebagai-jalan-dialog-agama>
- Salamah, N., Nugroho, M. A., & Nugroho, P. (2020). Upaya Menyemai Moderasi Beragama Mahasiswa IAIN Kudus Melalui Paradigma Ilmu Islam Terapan. *Quality*, 8(2), 269-290
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

- Sutrisno, E. (2019). Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Bimas Islam*, 12(2), 323-348.
- Tohor, Tarmizi (2019). Kemenag RI “Pentingnya Moderasi Beragama” Diakses dari <https://www.kemenag.go.id/read/pentingnya-moderasi-beragama-dolej>
- Turama, A. R. (2020). Formulasi teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons. *EUFONI*, 2(2)
- Yusuf, M. Z., & Mutiara, D. (2022). Diseminasi Informasi Moderasi Beragama: Analisis Konten Website Kementerian Agama. *Dialog*, 45(1), 127–137. <https://doi.org/10.47655/dialog.v45i1.53>